
PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI DI MASA PANDEMI COVID-19

Adi Fahrudin, Ph.D.

Dr. AL. Sentot Sudarwanto.S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, MS.

Ellya Susilowati, Ph.D.

Dr. Ida Hindarsah

Dr. Henry Yustanto, M.A.

Dr. Heri Erlangga

Dr. Lusi Andriyani

Mohammad Reevany Bustami, Ph.D.

Rajih Arraki', S.Sos.

Dr. Suryanto

Dr.Tria Astika Endah Permatasari



RF.EKO.48.01.2020

**PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI
DI MASA PANDEMI COVID-19**

Editor: Adi Fahrudin, Ph.D., Ellya Susilowati, Ph.D.,
Dr. Tria Astika Endah Permatasari, Dr. Suryanto

Desain Sampul: Eri Ambardi A
Setting & Layout Isi: Sofian Ferdianto
Sumber gambar pada awal bab: adaptasi dari berbagai sumber

Diterbitkan & dicetak oleh PT Refika Aditama
Jl. Mengger Girang No. 98, Bandung 40254
Telp. (022) 5205985, Fax. (022) 5205984
Email: refika_aditama@yahoo.co.id

Anggota IKAPI

Cetakan Kesatu, Agustus 2020

ISBN 978-623-7060-75-8

©2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
TANPA IZIN TERTULIS dari penerbit.



BAB 2

PERAN NEGARA DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK PASCA COVID-19

Lusi Andriyani¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: lusi.andriyani@umj.ac.id

Pendahuluan

Penyebaran Covid-19 sejak Desember di Wuhan telah membawa korban bagi 216 negara dengan data terkonfirmasi 4.347.935 positif Covid-19 dan sebanyak 297.241 meninggal dunia (www.satgas-covid-19.go.id). Di Indonesia, pasien terkonfirmasi positif berdasarkan data per 15 Mei 2020 sebanyak 16.496 positif, 3.803 sembuh dan 1.076 meninggal dunia (www.satgas-covid-19.go.id). Dalam merespon penyebaran Covid-19, Indonesia bersama Ghana, Liechtenstein, Norwegia, Singapura, dan Swiss menggagas “*Global Solidarity to Fight Covid-19*” pada Kamis, 2 April 2020 di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. melalui kesepakatan yang dilakukan secara virtual. Alasan mendasar digagasnya pertemuan virtual tersebut menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berdasarkan

pada pandangan bahwa virus corona merupakan tantangan terbesar sejak Perang Dunia II, dan tidak ada satu negara imun terhadap virus yang telah menjadi pandemi. Untuk itu PBB memiliki peran sentral untuk mengoordinasi respon global. PBB juga harus dapat memberikan harapan kepada komunitas internasional bahwa dengan kerja sama, solidaritas, serta kebijakan yang tepat, setiap negara dapat mengatasi krisis ini. Resolusi tersebut bertujuan untuk mendorong PBB supaya dapat berperan aktif melakukan kerja sama negara-negara untuk menahan laju penyebaran virus, mitigasi dampak melalui pertukaran informasi, kerja sama pengetahuan para ilmuwan, serta praktik baik dari tiap negara.

World Health Organization (WHO) sebagai organisasi kesehatan internasional telah mengeluarkan resolusi pertama pada 11 Maret 2020. Resolusi yang dihasilkan sejak ditetapkannya pandemi global oleh WHO ini lebih menekankan pada pesan politis tentang pentingnya persatuan, solidaritas, dan kerja sama internasional dalam upaya mitigasi pandemi global Covid-19. Resolusi tersebut menekankan pada peran sentral WHO di garda depan koordinasi dengan semua elemen masyarakat internasional (<https://nasional.kompas.com>, 3 april 2020). Respon pemerintah Indonesia melalui gagasan membangun “*Global Solidarity to Fight Covid-19*” sebagai wujud penguatan posisi negara di dunia internasional. Respon tersebut juga dinilai positif untuk menguatkan solidaritas dan kerjasama antar bangsa. Selain respon dan program yang bersifat politis melalui resolusi diatas, pemerintah Indonesia juga menguatkan program-program internal untuk dapat menanggulangi pandemi Covid-19 secara cepat. Strategi ini menempatkan peran negara sebagai lembaga yang diharapkan mampu memberikan solusi bagi masyarakat. Peran negara di tunjukkan beberapa melalui program (www.kemlu.go.id), yaitu mencakup:

1. Menerbitkan surat edaran kepada seluruh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota, Rumah Sakit Rujukan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL), untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan masuknya penyakit ini.
2. Menempatkan 135 *thermal scanner* di seluruh bandar udara di Indonesia terutama yang mempunyai penerbangan langsung dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Memberikan *health alert card* dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pada penumpang.
3. Menunjuk sedikitnya 100 Rumah Sakit Rujukan.
4. Membuka kontak layanan yang dapat diakses masyarakat untuk mencari informasi perihal virus corona. Nomor layanan informasi 0215210411 dan +6281212123119.

5. Pemerintah Indonesia pada tanggal 2 Februari 2020 membuat pengumuman: Penundaan seluruh penerbangan dari dan ke RRT yang berlaku mulai 5 Februari 2020 pukul 00.00 WIB, Pelarangan seluruh orang masuk dan transit ke Indonesia apabila selama 14 hari terakhir berada di RRT, Pencabutan sementara bebas visa dan *visa on arrival* untuk warga negara RRT dan Penghentian sementara impor *live animal* dari RRT.
6. Memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) dari Provinsi Hubei, RRT, pada 2 Februari 2020.

Memperkuat Peran dan Fungsi Negara

Kondisi di era pandemi Covid-19 menuntut negara berperan lebih kuat dengan memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Negara sebagai institusi terpenting diharapkan hadir menyelesaikan permasalahan yang ada didalam masyarakat, memfasilitasi dan mengarahkan masyarakat untuk mencari jalan keluar dari pandemic covid-19. Francis Fukuyama dalam bukunya yang berjudul “Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21” menjelaskan bahwa kondisi suatu negara yang mengalami aksi-aksi terorisme, penyebaran penyakit, bertahannya tingkat kemiskinan, serta merebaknya perang sipil bukanlah hal-ikhwal yang berdiri sendiri, melainkan sebuah gejala politik dimana negara sebagai institusi terpenting dalam masyarakat dianggap telah gagal menjalankan perannya. Fukuyama berpandangan bahwa kegagalan negara dalam menjalankan perannya tersebut akan menjadi ancaman terbesar bagi umat manusia pada abad ke-21 (Fukuyama, 2005).

Fukuyama berpendapat bahwa sudah saatnya memperkuat peran negara untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dengan terlebih dahulu memahami perannya dalam masyarakat. Peran negara dalam hal ini harus dipahami dari dua dimensi yaitu dimensi cakupan (*scope*) dan dimensi kekuatan kapasitas (*strength*). Kedua dimensi tersebut sebagai alat analisis untuk dapat menjelaskan peran negara dalam masyarakat. Fancis Fukuyama menjelaskan peran dan fungsi negara didasarkan pada peran indikator dari Bank Dunia yang dikembangkan dalam bentuk empat kuadran yang (Kuadran 1 sampai 4). Adapun fungsi-fungsi negara berdasarkan indikator Bank dunia sebagai berikut (Tabel 1):

Tabel 1
Indikator Fungsi Negara Berdasarkan Bank Dunia

Fungsi Negara	Menangani kegagalan pasar			Meningkatkan keadilan
Fungsi Minimal	Menyediakan kebutuhan public			Melindungi kaum miskin
	Pertahanan			Program anti kemiskinan
	Hukum dan ketertiban			Bantuan bencana
	Hak milik pribadi			
	Manajemen makro ekonomi			
	Kesehatan masyarakat			
Fungsi menengah	Menangani persoalan eksternal	Mengatur monopoli	Memperbaiki kualitas informasi	Menyediakan asuransi sosial
	pendidikan	Pengaturan sarana dan prasarana	asuransi	Redistribusi dana pensiun
	Perlindungan lingkungan	Anti monopoli	Regulasi keuangan	Memberi keringanan pada keluarga
			Perlindungan konsumen	Asuransi penaggguran
Fungsi Aktifis	Mengkoordinasi Aktivitas swasta			Redistribusi
	Mendorong pasar			Redistribusi aset
	Mengumpulkan inisiatif			

Sumber: Fukuyama:9, 2002

Dalam Tabel 1 digambarkan pembagian fungsi negara menjadi tiga, yaitu: fungsi minimal, fungsi menengah dan fungsi aktifis. Dalam fungsi minimal negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan kebutuhan publik (pertahanan, hukum, dan ketertiban, hak milik pribadi, manajemen makroekonomi, kesehatan masyarakat) dan mampu meningkatkan keadilan serta melindungi kaum miskin. Adapun dalam fungsi menengah, peran negara lebih didorong untuk menangani persoalan eksternal (pendidikan dan lingkungan), mengatur monopoli/kepemilikan,

memperbaiki kualitas pendidikan, asuransi, regulasi keuangan serta asuransi sosial. Dalam fungsi aktivis negara berfungsi untuk menyusun regulasi atau kebijakan dibidang industri, serta redistribusi kekayaan.

Dalam konseptualisasi ini negara harus mempunyai kualitas tata kelola yang baik dimana tata kelola dipahami sebagai kinerja agen dalam melaksanakan keinginan pemimpin, dan bukan tentang tujuan yang ditetapkan seorang pemimpin. Pemerintah dalam hal ini merupakan organisasi yang dapat melakukan fungsinya; *“The government is an organization that can do its functions better or worse”* (Fukuyama, 2013). Dengan demikian tata kelola dalam hal ini menyangkut eksekusi, atau apa yang masuk dalam wilayah administrasi publik, yang bertentangan dengan politik atau kebijakan publik.

Francis Fukuyama kemudian mengembangkan indikator tersebut dalam pola empat kuadran, dimana masing-masing akan dapat memilah posisi negara berdasarkan fungsinya dengan mempertimbangkan terlebih dahulu dua indikator penting, yaitu; dimensi cakupan (*scope*) dan dimensi kekuatan kapasitas (*strength*). Terdapat sumbu X dan Y, dimana sumbu X menjelaskan tentang dimensi cakupan (*scope*) dan sumbu Y menjelaskan dimensi kapasitas (*strength*). Pada kuadran I menjelaskan posisi dimana apabila Negara mempunyai lingkup yang terbatas dengan kapasitas Negara yang kuat. Kuadran II menjelaskan posisi dimana lingkup negara yang luas dengan kapasitas yang sangat kuat. Kuadran III menjelaskan posisi dimana lingkup negara yang terbatas dengan kapasitas yang terbatas. Kuadran IV menjelaskan posisi dimana lingkup negara sangat luas dengan kapasitas terbatas.

Langkah Indonesia dalam Menangani Covid-19

Kondisi dunia yang sedang diserang wabah dan pandemi covid-19 telah memunculkan pertanyaan besar, bagaimana negara mengatasi hal ini? Apakah negara mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya untuk dapat melewati pandemi Covid-19? atau sebaliknya. Pertanyaan tersebut setidaknya dapat dijelaskan dengan pandangan Francis Fukuyama yang melihat bagaimana upaya negara dalam memahami masyarakat melalui dua dimensi, yaitu: dimensi cakupan (*scope*) dan dimensi kekuatan kapasitas (*strength*).

Untuk menggambarkan peran negara, terlebih dahulu kita melihat sejauh mana efek pandemi Covid-19 ini beimbans di masyarakat. Terdapat beberapa data yang dapat menggambarkan kondisi tersebut dalam bentuk tabel dibawah ini.

Tabel 2
Efek Covid-19 Bagi Masyarakat

Efek COVID-19 Bagi Masyarakat	Data
Ekonomi Rumah tangga memburuk (kompas.com: 12 Mei 2020)	SMRC : Survei melalui telepon pada 5-6 Mei 2020 dengan melibatkan 1.235 responden, dan <i>margin of error</i> sebesar 2,9 persen. <ul style="list-style-type: none"> • 79% menilai bahwa kondisi ekonomi mereka saat ini lebih buruk, 19% tidak ada perubahan, 1% lebih baik. • 84% warga menilai kondisi ekonomi nasional lebih buruk dibanding sebelum adanya pandemi Covid-19 • Banyak PHK
Kesehatan masyarakat (covid19.go.id)	Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Positif: 16.496, sembuh: 3.803, Meninggal 1.076
Psikologi masyarakat terganggu (suara.com: 01 Mei 2020)	Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa mencatat setidaknya sudah 1.522 orang yang tercatat mengalami depresi atau gangguan mental
Ketahanan pangan masyarakat menurun (Kontan.co.id; 21 April 2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Kenaikan harga bahan pangan di sejumlah daerah masih tergolong relatif kecil, namun pemerintah harus mewaspadaai permainan para mafia pangan yang kerap menumpuk bahan kebutuhan dasar ini guna menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen dan produsen pangan. • Disrupsi yang dihadapi petani akan kian kencang dan rantai pasok pangan akan mengalami gangguan yang serius yang pada gilirannya meningkatkan kepanikan sosial dan darurat pangan di tengah warga
Keamanan terganggu (kompas.com: 27 april 2020)	Peningkatan angka kriminalitas sebesar 10 persen di wilayah Jabetabek selama pandemi Covid-19 sejak Maret hingga April 2020

Sumber: Diolah dari media online

Dampak Covid-19 telah dirasakan banyak masyarakat baik dalam kaitan ekonomi, kesehatan, psikologi, pangan dan keamanan. Untuk itu dibutuhkan respon cepat negara dalam memberikan pelayanan publik yang baik. Dalam mengukur kemampuan atau kapasitas negara untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dimasa covid-19 dapat dilihat dari program-program yang digulirkan. Kapasitas bisa dilihat dari respon lembaga atau instansi negara, sedangkan ruanglingkup dilihat dari bidang-bidang apa saja yang telah bergerak untuk memberikan program layanan masyarakat. Program-program negara yang menggambarkan dimensi cakupan (*scope*) dan dimensi kekuatan kapasitas (*strength*) dapat dilihat dalam Tabel 3.

Tabel 3
Ruang Lingkup dan Kekuatan Negara

Ruang lingkup	Kekuatan --- program
Hukum/ kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenkes RI pada 28 Januari 2020, (2) informasi upaya pencegahan Covid-19 pada 21 Januari 2020 melalui biro komunikasi dan pelayanan masyarakat • Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2019 pada tanggal 17 Juni 2019 tentang peningkatan kemampuan dalam mencegah , mendeteksi dan merespons wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklir biologi dan kimia. • Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.
Ketertiban	<p>Polda Metro Jaya telah membentuk tim satgas begal dan preman yang akan melakukan giat patroli di wilayah-wilayah rawan kejahatan yang telah dipetakan sebelumnya</p>
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam APBN dan APBD. • Pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan ulang anggarannya untuk mempercepat pengentasan dampak Covid-19, baik dari sisi kesehatan dan ekonomi. • Menjamin ketersediaan bahan pokok, diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat. • Program Padat Karya Tunai diperbanyak dan dilipatgandakan, dengan catatan harus diikuti dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan virus Covid-19. • Pemerintah memberikan tambahan sebesar Rp 50.000 pada pemegang kartu sembako murah selama enam bulan. pemerintah menganggarkan biaya Rp 4,56 triliun. • Mempercepat implemantasi kartu pra-kerja guna mengantisipasi pekerja yang terkena PHK, dan pengusaha kecil yang kehilangan omzet. • Pemerintah juga membayarkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang selama ini dibayar oleh wajib pajak (WP) karyawan di industri pengolahan. Alokasi anggaran yang disediakan mencapai Rp 8,6 triliun. • Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi kredit di bawah Rp 10 miliar untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berupa penurunan bunga dan penundaan cicilan selama setahun.

Kesehatan	<p>Bantuan sebesar Rp 75 triliun :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan tenaga kesehatan yang utamanya dilakukan dengan pembelian Alat Pelindung Diri (APD). • Pembelian alat-alat kesehatan prioritas seperti test kit, reagen (bahan yang dipakai dalam reaksi kimia, biasa dipakai untuk mengetes darah), ventilator, hand sanitizer, dan lain-lain sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. • Upgrade 132 rumah sakit (RS) rujukan bagi penanganan pasien COVID-19 termasuk Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. • Insentif untuk dokter spesialis sebesar Rp 15 juta/bulan, dokter umum Rp 10 juta/bulan, perawat Rp 7,5 juta/bulan, dan tenaga kesehatan lainnya Rp 5 juta/bulan. • Santunan kematian terhadap tenaga medis Rp 300 juta • Dukungan tenaga medis, serta penanganan kesehatan lainnya.
-----------	---

Sumber: Media online

Tabel 3 menggambarkan beberapa program yang digulirkan oleh negara dari berbagai ruang lingkup yaitu mencakup hukum, ketertiban, ekonomi dan kesehatan. Dalam masing-masing bidang cakupan, terdapat berbagai macam program yang digulirkan. Sebagai contoh di bidang hukum pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan secara cepat dari mulai Instruksi presiden, peraturan kementerian kesehatan sampai peraturan daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik dimasa pandemi Covid-19. Dalam bidang ekonomi, dilakukan juga berbagai upaya oleh pemerintah yaitu memangkas APBD dan mengalihkan ke program yang dapat membantu ketahanan masyarakat sebagai pilihan dalam kondisi pandemi covid-19. Selain itu juga pemerintah memberikan bantuan bahan pokok, memberikan subsidi bagi masyarakat yang terkena PHK serta relaksasi kredit dan pembayaran pajak menjadi salah satu program negara untuk dapat membantu masyarakat dalam kondisi pandemi covid-19. Menurut Tendler pajak adalah titik awal yang masuk akal untuk mengukur kapasitas negara, ia memiliki beberapa batasan penting. Tarif pajak mempunyai potensi ekstraktif dan sebagai pilihan kebijakan untuk dapat membantu negara dalam menangani kondisi keuangan saat ini. Namun program ini perlu didukung dengan administrasi yang baik tanpa korupsi. Begitu pula dengan birokrasi dan budaya organisasi memiliki peran penting sebagai solusi dari permasalahan pandemi Covid-19. Seperti yang telah dituliskan oleh Judith Tendler tentang negara miskin dengan sumber daya kurang di Brasil Timur Laut yang tetap mencapai hasil tata kelola yang sangat baik (Tendler, 1997). Disisi lain Francis Fukuyama berpendapat bahwa jika perpajakan akan digunakan sebagai ukuran kapasitas negara, maka sewa sumber daya harus dikecualikan (Fukuyama, 2013).

Profesionalisme Birokrasi dan Upaya Memperkuat Peran Negara

Profesionalisme dalam birokrasi dibutuhkan untuk memperkuat negara dalam perannya memberikan pelayanan publik. Birokrasi model Belanda menurut Francis Fukuyama akan menghasilkan layanan yang lebih baik daripada birokrasi yang sangat diskresioner dan patrimonial, seorang birokrat dipilih berdasarkan “prestasi”. Namun mungkin ada keadaan dimana sedikitnya aturan justru menghasilkan respons yang lebih cepat dan lebih baik (Fukuyama, 2013). Kondisi tersebut akan berbeda dilapangan, dimana dalam kondisi bencana biasanya dituntut untuk profesional, terlatih dan operasi penyelamatan. Fenomena masyarakat juga muncul dalam hubungan informal yang lebih kuat, khususnya tetangga yang berfungsi sebagai informan pertama. Tetangga berperan penting untuk memberikan bantuan penyelamatan langsung. Respon yang sigap dari masyarakat sekitar sangat membantu birokrasi sebagai institusi negara dan suprastruktur dalam sistem dalam memberikan pelayanan publik. Kesiapan siaga bencana, dan langkah-langkah mitigasi adalah faktor utama yang mempengaruhi kematian terkait bencana di negara-negara berkembang (McEntire, 1999). Khususnya dalam kondisi pandemi Covid-19, komunitas yang lebih miskin adalah yang paling banyak rentan terhadap bencana. Faktor sosial, politik, budaya, dan ekonomi juga berpengaruh terhadap kehidupan mereka yang memaksa mereka untuk hidup di daerah berisiko (Benson, *et al.*, 2001).

Dalam kondisi inilah birokrasi dan pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan dari negara memainkan peran penting sebelum, selama dan setelah bencana. Karena pemerintah daerah yang lebih mengenal masyarakat dengan sangat baik. Namun secara umum, pemerintah daerah adalah salah satu lembaga yang paling kekurangan dalam pemahaman tentang penanganan bencana (Kusumasari, Alam, & Siddiqui, 2010). Kesalahan yang biasanya dibuat oleh pemerintah daerah ketika mencegah bencana seringkali dapat dihubungkan dengan kepercayaan institusional yang kaku, mengabaikan pengaduan dari luar, kesulitan dalam menangani berbagai sumber informasi, dan kecenderungan untuk meminimalkan bahaya (Turner, 1976b; Kusumasari *et al.*, 2010)

Ketahanan Komunitas dan Modal Sosial Upaya Memperkuat Peran Negara

Kita harus memahami bahwa pemerintah daerah memiliki sumber daya yang terbatas untuk menangani bencana. Jejaring di antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam respons dan pemulihan manajemen bencana juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Perlu peran penting diluar aktor negara. Para

pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, pusat dan provinsi, lembaga donor, LSM dan masyarakat. Disisi lain perlu menciptakan kekuatan yang signifikan dalam upaya untuk menangani kegiatan darurat dan pasca bencana (Kusumasari, 2012). Kondisi bencana termasuk pandemi Covid-19 menuntut respons yang cepat dari kebijakan umum untuk memperkuat infrastruktur yang dibutuhkan. Namun kondisi tanggap bencana selalu berkembang beriringan dengan siklus politik dan kepentingan politik, bukan menjadi sebuah keharusan (Healy dan Malhotra, 2009). Keterbatasan kemampuan negara untuk memberikan pelayanan publik menuntut kemampuan kolektif suatu lingkungan atau wilayah untuk mengatasi kondisi tersebut. Kemampuan kolektif yang dilakukan oleh masyarakat dengan membangun jejeraing dan kerjasama sebagai bentuk kekuatan komunitas. Para ahli manajemen bencana telah mengadopsi berbagai bentuk ketahanan sebagai cara untuk mengatasi kerugian dan pulih dari dampak (Aldrich dan Meyer, 2015). Ketahanan komunitas juga disarankan oleh Badan Manajemen Darurat Federal.

Kekuatan komunitas wajib ditumbuhkan sebagai upaya mendukung negara dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Kekuatan komunitas dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk menguatkan peran dan fungsi negara. Untuk itu perlu upaya untuk membangun dan memelihara kemitraan di antara manajemen darurat, sektor masyarakat, dan organisasi; memberdayakan aksi lokal melalui peningkatan modal sosial dan aktivitas sipil; dan meningkatkan dan memperkuat infrastruktur sosial, jaringan, dan aset yang ada (Aldrich dan Meyer, 2015). Harrison berpendapat bahwa ikatan modal sosial membuat kontribusi penting untuk memecahkan masalah skala kecil setelah bencana, sementara menghubungkan jejaring sosial sangat penting untuk mengatasi masalah yang lebih besar. Terlepas dari pentingnya jaringan sosial tingkat lokal dalam ketahanan masyarakat dan pemulihan bencana, peran potensial dan kontribusi dari jaringan khusus ini sering diabaikan, dan diperlakukan sebagai tidak penting oleh pembuat kebijakan (Islam dan Walkerden, 2017). Jaringan sosial dianggap tertanam dalam sistem sosial yang lebih besar yang dirujuk oleh beberapa orang sebagai komunitas yang tidak terikat pada satu wilayah geografis. Ukuran jaringan, keterhubungannya (kepadatan), sentralitas, formalisasi, dan hierarki mencerminkan kondisi sosial yang penting. Modal sosial juga dapat memfasilitasi produktivitas dan tindakan terkoordinasi (Schellong, 2008).

Negara dalam Kuadran

Dilihat dari program serta langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, diperoleh gambaran bahwa negara Indonesia mempunyai ruang lingkup yang luas untuk diselesaikan dengan kekuatan kapasitas negara yang minim. Hal ini ditunjukkan dengan respon negara yang belum maksimal. Mengutanya peran masyarakat secara sukarela sebagai cermin bahwa negara memnutuhkan energi baru dari modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Luasnya cakupan yang menjadi tanggungjawab negara dapat dibagi dengan kekuatan masyarakat yang bergerak secara masif, berjejaring membangun komunitas. Dengan demikian akan terbangun ketahanan komunitas yang dapat menjadi energi dan dorongan bagi menguatnya negara. Fungsi penting negara bisa dijalankan dengan dukungan ketahanan komunitas dan modal sosial (gotong royong, suka membantu, sukarela, relawan, donasi, dll). Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa modal sosial sebagai jaringan sosial yang tertanam ke dalam sistem jaringan lain (masyarakat). Individu yang berinteraksi dalam struktur mikro pada gilirannya terkait dengan struktur tingkat makro (Tindall dan Wellman, 2001). Modal sosial didefinisikan oleh fungsinya. Ini bukan entitas tunggal dan dapat dicirikan oleh dua fundamental. Ia memiliki beberapa aspek struktur sosial dan memfasilitasi tindakan tertentu dari aktor dalam struktur.

Tidak seperti bentuk modal lainnya, modal sosial melekat dalam struktur hubungan antara aktor dan antar aktor. Jika modal fisik sepenuhnya berwujud, diwujudkan dalam bentuk materi yang dapat diamati, dan modal manusia kurang berwujud, diwujudkan dalam keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh oleh seorang individu, modal sosial belum berwujud, karena ia ada dalam hubungan antar pribadi. Jaringan yang dibangun individu dipahami sebagai faktor penting dalam penanganan bencana (Schellong, 2008) democratic processes, and disaster management. This paper seeks to explore the use of social networking services (SNSs). Apabila dikaitkan dengan kuadran yang dikembangkan oleh Francis Fukuyama dalam melihat kompetensi/kekuatan serta ruang lingkungnya, maka negara Indonesia dapat digambarkan dalam posisi kuadran IV. Dalam kuadran IV dijelaskan bahwa fungsi atau lingkup yang ditangani negara lebih luas dengan kapasitas yang terbatas. Dalam konteks Indonesia, upaya program yang dijalankan oleh pemerintah sangat banyak, meliputi berbagai macam bidang, namun disisi lain kapasitas yang dimiliki baik dari segi Sumberdaya manusia dan pendanaan sangat terbatas. Hal ini dibuktikan dengan peran masyarakat sipil yang menguat. Kegiatan yang muncul secara spontan sebagai bentuk modal sosial seperti memberi sumbangan, memberi bantuan, memberikan perhatian,

bergerak bersama memberi penyadaran justru dilakukan oleh masyarakat sendiri, dengan mengoptimalkan jejaring yang mereka miliki. Upaya inilah yang justru sebagai instrumen penting untuk menempatkan kembali negara dalam posisi kuadran I. Dengan kekuatan modal sosial mampu menguatkan kapasitas negara dalam menangani pandemi Covid-19 secara bersama-sama.

Kesimpulan

Dengan fungsi yang banyak meliputi: hukum, ketertiban, ekonomi, dan kesehatan mengakibatkan banyak lembaga yang belum bisa optimal menjalankan peran. Kondisi ini menuntut masyarakat sipil bergerak secara mandiri melalui jejaring yang mereka miliki. Dengan modal sosial maka diharapkan dapat menguatkan peran negara dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Maknanya adalah modal sosial sebagai salah satu instrumen penting menempatkan posisi negara pada kuadran I. Sehingga pasca Covid-1, masyarakat sipil secara tidak langsung akan semakin MANDIRI untuk memenuhi kebutuhan dasar. Menguatnya peran masyarakat sipil menjadi sisi positif untuk mendorong kuatnya lembaga negara dalam menjalankan peran pelayanan publik. Dengan dukungan regulasi yang kuat Negara mampu mendorong masyarakat sipil sebagai subjek, tidak hanya sebagai objek sebagai salah satu instrumen untuk mendukung penguatan kelembagaan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldrich, D. P., & Meyer, M. A. (2015). Social Capital and Community Resilience. *American Behavioral Scientist*, 59(2), 254–269. <https://doi.org/10.1177/0002764214550299>
- Fukuyama, F. (2013). Commentary What Is Governance ?, 26 (3), 347–368. <https://doi.org/10.1111/gove.12035>
- Islam, R., & Walkerden, G. (2017). Social networks and challenges in government disaster policies: A case study from Bangladesh. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 22, 325–334. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2017.02.011>
- Kusumasari, B. (2012). Network organisation in supporting post-disaster management in Indonesia. *International Journal of Emergency Services*, 1(1), 71–85. <https://doi.org/10.1108/20470891211239326>

- Kusumasari, B., Alam, Q., & Siddiqui, K. (2010). Resource capability for local government in managing disaster. *Disaster Prevention and Management: An International Journal*, 19(4), 438–451. <https://doi.org/10.1108/09653561011070367>
- Schellong, A. R. M. (2008). Government 2.0: An exploratory study of social networking services in Japanese local government. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 2(4), 225–242. <https://doi.org/10.1108/17506160810917936>
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/03/13520021/pbb-hasilkan-resolusi-pertama-covid-19-indonesia-ikut-menggagas-berita-tentang-apa>
- <https://kemlu.go.id/hanoi/id/news/5105/langkah-dan-upaya-pemerintah-indonesia-dalam-menangani-dan-menghadapi-covid-19-berita-tentan-apa>
- www.kompas.com, 12 mei 2020
- www.covid19.go.id. Berita tentang apa
- www.suara.com, judul tulisan? 01 Mei 2020
- www.kontan.co.id, judul tulisan? 21 April 2020
- www.kompas.com, judul tulisan? 27 April 2020